



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 060-401.021/ 57 /2023**  
**TENTANG**  
**TIM REFORMASI BIROKRASI**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan regulasi pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/8/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas:

- a. merumuskan *road map* pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. melaksanakan *road map* reformasi birokrasi dan program-program prioritas pada lingkup Pemerintah Kota Madiun;
- c. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : 1. Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;  
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/8/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 17 April 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

**TEMBUSAN:**

Yth. Sdr. Segenap Tim Reformasi Birokrasi  
dimaksud.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR : 060-401.021/ 57 /2023  
 TANGGAL : 17 April 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I	Pelindung	Wali Kota
II	Pembina	Wakil Wali Kota
III	Ketua	Sekretaris Daerah
IV	Sekretaris	a. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Bidang-bidang	
	a. Monitoring dan Evaluasi	
	1. Koordinator	Inspektur
	2. Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	b. Reformasi Birokrasi General	
	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
	a) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	2. Indeks Perencanaan Pembangunan	
	a) Koordinator	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
	3. Pembangunan Zona Integritas	
	a) Koordinator	Inspektur
	b) Anggota	Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun



1	2	3
	<p>4. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>5. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>6. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>7. Penataan Jabatan Fungsional</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>8. Penguatan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>9. Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p>	<p>Inspektur</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Inspektur</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p>

1	2	3
	<p>10. Penguatan Sistem Merit</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>11. Pelaksanaan <i>Core Values</i> Aparatur Sipil Negara</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>12. Pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>13. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>14. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>15. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>16. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima</p> <p>a) Koordinator</p>	<p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>

1	2	3
	<p>b) Anggota</p> <p>17. Pelaksanaan Arsip Digital</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>18. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>19. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>20. Penguatan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>21. Penyederhanaan Organisasi</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>22. Penyusunan Sistem Kerja</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p>	<p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p>

1	2	3
	<p>c. Reformasi Birokrasi Tematik</p> <p>1. Pelaksanaan Tematik Pengentasan Kemiskinan</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>2. Pelaksanaan Tematik Peningkatan Investasi</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>1) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>2) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>4) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>5) Kepala Dinas Pendidikan</p> <p>6) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>7) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>8) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>9) Camat Kartoharjo</p> <p>10) Camat Manguharjo</p> <p>11) Camat Taman</p> <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>1) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>2) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p>

1	2	3
	<p>3. Pelaksanaan Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>4. Pelaksanaan Tematik Pengendalian Inflasi</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>5. Pelaksanaan Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p>	<p>Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun</p> <p>Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Dinas Perdagangan</p> <p>Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah</p> <p>1) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>2) Inspektur</p>

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009